

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN**



**LITERASI KEUANGAN PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN PENDIDIKAN
(SMK NEGERI DI KOTA PEKANBARU)**

Tim Peneliti

Ketua : Dr. Suarman, M.Pd
Anggota : Dr. Gusnardi, SE., M.Si., Ak., CA
Anggota (Mhs) : Ainil Huda

**Program Studi Pendidikan Ekonomi-Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

SUMBER DANA : DIPA PNB BLU FKIP UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2019
Nomor Kontrak : 2027/UN.19.5.1.1.5/TU/2019

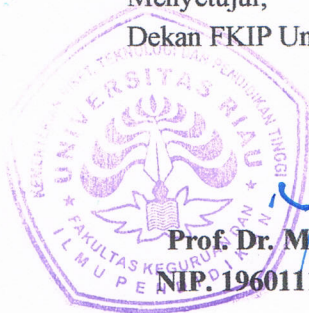
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
OKTOBER 2019**

Halaman Pengesahan Hasil Penelitian Unggulan

1. Judul Penelitian : **Literasi Keuangan Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan (SMK Negeri di Kota Pekanbaru)**
 2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Suarman, M.Pd**
 - b. NIP : 195912081986021002
 - c. NIDN : 0008125903
 - d. Gol/Jabatan Fungsional : IV-b/ Lektor Kepala
 - e. Telp/HP : 0812 7523839
 - f. Email : suarman @lecturer.unri.ac.id
 - g. Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 3. Anggota
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Gusnardi, SE,M.Si.,Ak.,CA**
 - b. NIP : 196712071999031001
 - c. NIDN : 0007126704
 - d. Gol/Jabatan Fungsional : IV-b/ Lektor Kepala
 - e. Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 4. Mahasiswa
 - a. Nama : **Ainil Huda**
 - b. NIM : 1505116755
 - c. Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
 6. Jumlah Dana : Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
 - Sumber Dana : PNBP FKIP Universitas Riau tahun 2019
- Nomor Kontrak : 2027/UN.19.5.1.1.5/TU/2019

Pekanbaru, 23 Oktober 2019

Menyetujui;
Dekan FKIP Universitas Riau,

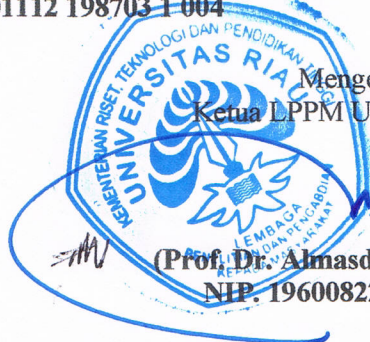


Prof. Dr. Mahdum, M.Pd
NIP. 19601112 198703 1 004

Ketua Peneliti,

Dr. Suarman, M.Pd
NIP. 19591208 198602 1002

Mengetahui;
Ketua LPPM Universitas Riau,



(Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP)
NIP. 19600822 199002 1002

Daftar Anggota Kegiatan Penelitian

1. Ketua Pelaksana

Nama Lengkap dan Gelar : **Dr. Suarman, M.Pd**
NIP & NIDN : 195912081986021002 dan 0008125903
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : -
Pangkat dan Golongan : Pembina Tingkat 1/ IV-b
Fakultas / Jurusan : FKIP/ Pendidikan Ekonomi Akuntansi

2. Anggota

Nama Lengkap dan Gelar : **Dr. Gusnardi, SE,M.Si.,Ak.,CA**
NIP & NIDN : 196712071999031001 dan 0007126704
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : -
Pangkat dan Golongan : Pembina Tingkat 1/ IV-b
Fakultas / Jurusan : FKIP/ Pendidikan Ekonomi Akuntansi

3. Anggota (Mahasiswa S1)

Nama Lengkap : **Ainil Huda**
NIM : 1505116755

Ringkasan Penelitian

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi isu yang menarik, karena literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat (OJK, 2013).

Perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat berdasarkan hasil survei bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan tinggi terhadap produk keuangan tabungan yaitu sebesar 98.2%. Pengetahuan masyarakat akan produk tabungan yang tinggi tidak diimbangi dengan besarnya persentase jumlah masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Masyarakat pengguna produk tabungan hanya sebesar 50.8%. Persentase pengetahuan dan penggunaan terhadap produk pegadaian adalah persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 0.9% (pengetahuan) dan 0.0% (penggunaan). (OJK, 2017).

Pentingnya memahami literasi keuangan bagi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Amaliyah dan Witiastuti (2015). Dikatakannya bahwa individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar serta kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengetahuan keuangan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini termasuk penelitian survey yang dilaksanakan pada satuan pendidikan SMK Negeri yang ada di Pekanbaru, sedangkan subjek penelitiannya adalah Pengelola Keuangan satuan pendidikan tersebut yang terdiri dari 7 (tujuh) SMK Negeri yang ada di Pekanbaru dan dari masing-masing SMK dijadikan responden sebanyak 3 orang, sehingga jumlah responden (sampel) sebanyak 21 orang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan pengelolaan keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru masih dalam kategori rendah, dari lima dimensi yang diteliti hanya pengetahuan dasar keuangan yang dalam kategori sedang, empat lainnya masih rendah. Rendahnya tingkat literasi keuangan pengelola keuangan di SMKN di Kota Pekanbaru bisa disebabkan karena memang mereka belum memahami secara mendalam tentang literasi keuangan walaupun mereka sebagai pengelola keuangan, latar belakang pendidikan responden tidak semua responden berlatar belakang ekonomi atau akuntansi bahkan sebahagian besar berasal dari exacta, dan responden sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan literasi keuangan.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian tentang Literasi keuangan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut tentunya dapat dijadikan peluang untuk peningkatan penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis tetap berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Terselesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE.,MP, ketua LPPM Universitas Riau
2. Bapak Prof. Dr. Mahdum,M.Pd Dekan FKIP Universitas Riau.
3. Bapak Ketua Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau.
4. Rekan - rekan Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau atas masukan dan kritikan yang membangun yang telah diberikan kepada penulis untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.

Pekanbaru, Oktober 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Ringkasan	ii
Pra Kata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Literasi Keuangan	5
2.1.1 Dimensi <i>Financial Literacy</i>	6
2.1.2 Pengetahuan Keuangan	6
2.1.3 Perilaku Keuangan	8
2.1.4 Pengelolaan Keuangan.....	8
2.2 Pengelola Keuangan Institusi Pendidikan	8
2.2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah	8
2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah/Madrasah	10
2.2.3 Merencanakan dan Membelanjakan Anggaran Sekolah	11
2.2.4 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekolah	12
2.3 Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODE PENELITIAN	
4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	15
4.2 Jenis Penelitian	15
4.3 Populasi dan Sampel	15
4.4 Jenis dan Sumber Data	15
4.5 Teknik Pengumpulan Data	15
4.6 Teknik Analisis Data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian	17
4.2 Pembahasan Penelitian	18
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar SMK Negeri di Kota Pekanbaru.....	15
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Tingkat Literasi Keuangan (Pengetahuan).....	15
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Pengetahuan Pengelola Keuangan	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan seseorang selalu dikaitkan dengan kemampuan yang dimilikinya, ada beberapa kemampuan yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan termasuk dalam melakukan pekerjaan. Dalam beberapa literatur kemampuan tersebut dikenal dengan literasi yakni kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media.

Kemampuan untuk memahami dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal, dari non formal biasanya diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan, baik itu dalam pekerjaan atau dalam bermasyarakat. Kemampuan untuk memahami suatu objek sedang digalakkan oleh pemerintah seperti di kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dikenal dengan literasi sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Secara nasional pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap literasi ini, baik literasi sekolah maupun literasi keuangan, khusus untuk literasi keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global. Pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. (OJK, 2013).

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi isu yang menarik, karena literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat (OJK, 2013).

Perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat berdasarkan hasil survei bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan tinggi terhadap produk keuangan tabungan yaitu sebesar 98.2%. Pengetahuan masyarakat akan produk tabungan yang tinggi tidak diimbangi dengan besarnya persentase jumlah masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Masyarakat pengguna produk tabungan hanya sebesar 50.8%. Persentase pengetahuan dan penggunaan terhadap produk pegadaian adalah persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 0.9% (pengetahuan) dan 0.0% (penggunaan). (OJK, 2017).

Menurut Kardinal (2015) pengetahuan dan penggunaan produk keuangan pada masyarakat yang rendah disebabkan oleh tingkat literasi keuangan yang rendah. Untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan yang rendah ini, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang literasi keuangan. Khusus untuk guru-guru pemerintah melalui OJK juga telah melakukan bimbingan kepada guru tentang literasi keuangan dengan harapan dapat di ajarkan kepada murid-muridnya di sekolah masing-masing.

Kerjasama dalam meningkatkan literasi keuangan bagi guru-guru telah dimulai Sejak tahun 2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibantu mitra kelompok kerja yang beranggotakan praktisi dari industri maupun akademisi telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun buku edukasi keuangan dari tingkat SD, SMP, SMA sehingga para guru dibekali pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan materi literasi keuangan bagi siswanya.

Kerjasama ini dengan menerbitkan buku-buku terkait dengan literasi keuangan, sehingga dapat di unduh dengan mudah dan gratis dari *minisite* sikapiuangmu (<http://sikapiuangmu.ojk.go.id>). Hal ini dilakukan supaya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah dan murah, guru dan murid bisa menyimpan materi di komputer atau telepon pintar masing-masing.

Selain bekerjasama dengan dinas pendidikan di berbagai daerah dalam pendistribusian buku, OJK juga mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk turut berperan dalam menyebarkan buku-buku tersebut ke berbagai wilayah. Pada prinsipnya siapa pun boleh mencetak maupun membuat salinan buku-buku tersebut, selama tidak untuk dijual. (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>).

Pentingnya memahami literasi keuangan bagi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Amaliyah dan Witiastuti (2015). Dikatakannya bahwa individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar serta kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan.

Seperti bahan pangan dan papan bagi manusia, begitu juga dengan literasi keuangan di zaman global ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah keuangan (Krishna dkk., 2010). Dengan memahami secara baik dan cukup literasi keuangan akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, maka individu tadi dapat mengelola dengan baik atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat Robb dan James (2009).

Pelaku pengelolaan keuangan bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisasi baik di institusi pemerintah maupun organisasi swasta lainnya. Untuk tingkat sekolah pengelola keuangan disekolah dilakukan oleh beberapa orang termasuk bendahara sekolah.

Pihak pengelola keuangan di sekolah memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan di sekolahnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga keuangan sekolah dapat digunakan secara optimal dan benar. Pedoman dalam pengelolaan keuangan sekolah ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang merupakan pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Harapan pemerintah dengan meningkatnya kemampuan atau literasi keuangan khususnya bagi guru-guru terutama dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga aktivitas sekolah khusus yang berkaitan dengan keuangan tidak akan mengalami kendala yang berarti.

Pengelolaan keuangan sekolah semenjak digulirkan dana bantuan operasional sekolah disingkat dengan BOS, pengelolaan keuangan sekolah disini sebegini besar juga sama dengan mengelola dana BOS, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola, dari mana sumber dana tersebut dan untuk apa dipergunakan.

Pengelolaan dan penggunaan dana BOS harus berdasarkan aturan atau standar yang telah ditetapkan misalnya adanya kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, yang terdiri dari dewan guru dan komite sekolah. Hasil

keepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Sekolah baik negeri maupun sekolah swasta memiliki tugas yang sama untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Sekolah swasta merupakan institusi pendidikan yang mencari sumber keuangan sendiri dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Guna mencapai pelayanan kualitas pendidikan yang optimal, sekolah swasta harus melakukan pengelolaan keuangan.

Penelitian yang terkait dengan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan sekolah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Carly Sawatzki & Peter Sullivan (2017) menurut mereka perlunya guru-guru perlu selalu merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang diinformasikan; mengidentifikasi dan menafsirkan kemungkinan untuk pengajaran dan pembelajaran literasi keuangan di Australia.

Berdasarkan penelitian Carly di atas dapat dipahami bahwa literasi keuangan sangat diperlukan bagi guru-guru, sehingga mereka dapat mengajarkan ke murid-murid mereka tentang pentingnya literasi keuangan tersebut dalam kehidupan dan bermasyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Surendar & Subramanya Sarma (2018) menemukan bahwa mayoritas guru di pendidikan tinggi memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, mereka menyadari akan pentingnya aspek perencanaan keuangan dan mampu merencanakan keuangan sendiri terlepas dari kepentingan mereka.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Anastasia Sri Mendari & Fransiska Soejono (2018). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa secara rata-rata *basic financial literacy* dosen-dosen di Palembang termasuk dalam kategori moderat, sedangkan rata-rata *advanced financial literacy* termasuk kategori rendah. Adapun tingkat literasi keuangan atau Financial Literacy Index secara keseluruhan termasuk kategori rendah.

Literasi keuangan merupakan hal yang mutlak di penuhi oleh setiap individu supaya memudahkan dalam mengambil keputusan keuangan, begitu juga dengan guru-guru khususnya guru-guru yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan di sekolah masing-masing. Diharapkan dengan baiknya tingkat literasi seseorang maka dalam organisasi tingkat literasi tersebut dapat dipertahankan sehingga dalam mengelola keuangan organisasi juga akan semakin baik.

Penelitian ini akan dilakukan di SMKN di Kota Pekanbaru, dipilihnya SMKN di Kota Pekanbaru karena sebahagian kecil guru-guru yang mengajar di SMKN tersebut mempunyai latarbelakang pendidikan ekonomi atau berkaitan dengan keuangan, dengan harapan pengetahuan mereka akan keuangan akan membantu pengelolaan keuangan di sekolah mereka menjadi lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Tingkat literasi seseorang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Guru-guru yang berlatarpendidikan ekonomi khususnya yang mengajar di SMK Negeri dan yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan di sekolahnya diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik sehingga keuangan sekolahnya

menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan latarbelakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tingkat literasi keuangan pengelolaan keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pengelolaan keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi adalah Pengetahuan keuangan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru.

D. Luaran/ Manfaat Penelitian

Luaran dari penelitian ini diantaranya; Laporan hasil penelitian, Artikel yang siap dipublikasikan ke dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi/Internasional , Prosiding seminar nasional/Internasional yang dilaksanakan oleh FKIP Universitas Riau.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak dinas pendidikan dalam membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru-guru dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah khususnya bagi guru dan pengelola keuangan sekolah lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Literasi Keuangan

Perhatian masyarakat terhadap literasi keuangan merupakan hal yang baru. Walaupun sebenarnya sejarah telah menunjukkan bahwa literasi keuangan sudah dimulai sejak tahun 1787 pada saat John Adam menulis surat yang ditujukan pada Thomas Jefferson mengenai perlunya literasi keuangan. Sampai saat sekarang banyak konsep dan pengertian mengenai literasi keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Salah satunya dikemukakan oleh UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama ketrampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana ketrampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Kemudian oleh Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai proses mengukur seberapa baik individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan pribadi. Huston mengkonseptualisasikan literasi keuangan pada dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman (pengetahuan mengenai keuangan pribadi) dan dimensi penggunaan (penerapan konsep dan produk keuangan pribadi).

Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (OJK, 2007).

Literasi keuangan terjadi ketika seseorang memiliki sekumpulan keahlian dan keterampilan yang membuat seseorang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Keahlian tersebut berupa keahlian membaca, menganalisis, mengatur dan mengkomunikasikan tentang keuangan. Keahlian dan keterampilan tersebut harus dikuasai oleh setiap individu agar mampu mengelola keuangan mereka dengan baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Empat hal penting yang selalu dibahas dalam financial literasi yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi (Remund dalam Widyawati, 2012). Keempat hal tersebut harus bisa dilakukan setiap individu. Setiap individu harus melakukan penganggaran ketika mereka mendapat uang, bisa memilah mana yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ditabung dan investasi. Apabila itu semua dilakukan dengan baik maka tidak perlu memerlukan uang tambahan dengan cara meminjam/ hutang, karena telah bisa melakukan penganggaran dan pengelolaan uang dengan baik.

Survey yang dilakukan OJK pada tahun 2013 hanya sebesar 22 persen saja masyarakat Indonesia yang memahami literasi keuangan dan 57 persen masyarakat Indonesia yang menggunakan fasilitas dan produk jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan instrumen pasar modal. Di pasar modal 15 persen masyarakat Indonesia yang menjadi investor. Selain itu *survey* yang dilakukan oleh OJK juga menyatakan bahwa seseorang dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat pemahaman keuangan sebesar 56,4 persen, kemudian diikuti oleh pelajar sekolah menengah atas sebesar 35,7 persen, sedangkan untuk pelajar di bawah tingkat menengah atas dan tidak bersekolah menunjukkan presentase yang lebih kecil yaitu 24,6 persen dan 13,6 persen (FAT, 2013, www.hukumonline.com). Indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 21,7 persen menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan di Singapura yaitu 98 persen (Hayat, 2014). Dari *survey* yang dilakukan OJK tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mengenai produk-produk keuangan masih sangat kurang dan mahasiswa memiliki pemahaman mengenai keuangan yang lebih baik karena latar belakang pendidikannya.

Sehingga OJK (2013) mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga individu mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.

OJK menyatakan bahwa visi literasi keuangan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan akses informasi. Misi dari literasi keuangan yaitu melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, dan meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan

Pengetahuan keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan *financial literacy* atau edukasi keuangan. Pengetahuan keuangan dapat tersalurkan dan dapat dipahami dengan baik melalui edukasi keuangan atau *financial literacy*. Menurut Chen dan Volpe (1998) *Financial Literacy* adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi. Kemampuan mengelola keuangan pribadi dibutuhkan individu untuk memanfaatkan produk keuangan secara optimal yang akan berpengaruh terhadap kualitas manusia..

Dalam *financial literacy* terdapat beberapa aspek keuangan yaitu:

1. *Basic Personal Finance*, mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam suatu *system* keuangan seperti perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu, likuiditas aset, dan lain-lain.
2. *Money management* (pengelolaan uang), mempelajari bagaimana seorang individu mengelola uang pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai *financial literacy* maka semakin baik pula individu tersebut mengelola uang pribadi mereka.
3. *Credit and debt management*, merupakan rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. (Nababan dan Sadalia, 2012).

Sedangkan Remund (2010) mendefinisikan literasi keuangan ke dalam lima kelompok, yaitu: 1) pengetahuan konsep keuangan; 2) kemampuan mengkomunikasikan konsep keuangan; 3) kemampuan mengatur keuangan pribadi; 4) kemampuan membuat keputusan finansial yang tepat; dan 5) kepercayaan diri dalam membuat perencanaan masa depan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan.

2.1.1 Dimensi *Financial Literacy*

Financial literacy mencakup beberapa dimensi keuangan yang harus dikuasai. Chen dan Volpe (1998) menyebutkan beberapa dimensi *financial literacy* yang meliputi pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, serta investasi.

a. Pengetahuan umum tentang keuangan

Menurut S.P Wagland dan S. Taylor (2009), pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain.

b. Tabungan dan pinjaman

Menurut Garman dan Fogue (2010), tabungan adalah akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. Dalam pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu dipertimbangkan (Kapoor, *et al.*, 2004), yaitu:

- 1) Tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan),
- 2) inflasi (perlu dipertimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat mengurangi daya beli),
- 3) pertimbangan pajak,
- 4) likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani *fee*),
- 5) keamanan (ada tidaknya proteksi terhadap kehilangan uang jika bank mengalami kesulitan keuangan, dan
- 6) pembatasan-pembatasan dan *fee* (penundaan atas pembayaran bunga yang dimasukkan dalam rekening dan pembebanan *fee* suatu transaksi tertentu untuk penarikan deposito).

c. Asuransi

Menurut Mehr dan Cammack (1990), asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

d. Investasi

Menurut Garman dan Fogue (2010), investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham, obligasi dan reksa dana, atau dengan membeli *real estate*.

2.1.2 Pengetahuan Keuangan

Pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi tidak hanya untuk kepentingan individu itu sendiri tetapi bisa untuk kepentingan orang banyak (masyarakat). Dalam hal pengetahuan keuangan tidak hanya bagaimana kita dapat mengelola keuangan saja, tetapi apakah kita dapat memberikan manfaat pada kondisi ekonomi yang sekarang maupun yang akan datang.

Financial literacy berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk mengelola keuangan. Untuk memiliki pengetahuan keuangan yang baik maka diperlukannya untuk memahami pula mengenai *Financial Skill* serta dapat menggunakan *Financial Tools*.

Menurut Remund D L (2010) menyatakan empat hal yang paling umum dalam finansial literasi adalah penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. Mahasiswa seharusnya sudah memiliki pengetahuan lebih mengenai keempat hal tersebut, setidaknya mengenai tabungan dan investasi.

Chen dan Volpe (1998) dalam penelitiannya menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat *financial literacy* rendah cenderung berpendapat negatif tentang keuangan dan membuat keputusan yang salah. Dengan memiliki *financial literacy*, mahasiswa mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Pada kenyataannya mahasiswa masih banyak yang memiliki kekurangan dalam memahami pengetahuan dan wawasan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang bijaksana. Memiliki pengetahuan keuangan dengan baik dapat membantu mensejahterakan kehidupan kita di kemudian hari.

2.1.3 Perilaku Keuangan

Behavioral finance ilmu yang di dalamnya ada interaksi dari berbagai disiplin ilmu (*interdisipliner*) dan terus berintegrasi sehingga dalam pembahasannya tidak bisa dilakukan isolasi. *Behavioral finance* tumbuh dari berbagai asumsi dan ide dari perilaku ekonomi. Dalam *behavioral finance* juga melibatkan emosi, sifat, kesukaan dan berbagai macam hal yang ada pada diri manusia sebagai makhluk intelektual dan social yang akan berinteraksi melandasi munculnya keputusan dalam melakukan tindakan. (Riciardi ,2000)

Menurut Rajna (2011) perilaku keuangan adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan ketika mengevaluasi praktik manajemen keuangan yang direkomendasikan dengan beberapa tingkatan kesepakatan dan ketidaksepakatan.

Kemudian Anis (2015) mengatakan *financial behavior* berkaitan dengan bagaimana orang mengobati, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia baginya. Pendapat lain menurut Gitman (2006) bahwa “perilaku keuangan pribadi adalah cara dimana individu mengelola sumber dana (uang) untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana, penentuan sumber dana, serta keputusan untuk perencanaan pensiun”.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan

Menurut Cummins M, Haskel J. H, & Jenkins S (2009) bahwa kemampuan seseorang untuk mengelolan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai sukses dalam hidup, sehingga pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menjadi penting bagi anggota masyarakat khususnya individu.

Pengelolaan keuangan tidak hanya untuk suatu organisai atau instansi saja, akan tetapi pengelolaan juga dibutuhkan bagi setiap individu agar dikemudian hari tidak terjadi pembengkakan dana keluar untuk hal yang tidak kita inginkan. Menurut Andrew V dan Linawati N (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku keuangan dimana semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang yang dimiliki akan cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya.

Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya akan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan pasar, tetapi mereka lebih cenderung harus menanggung risiko keuangan di masa depan yang lebih dari orang tua mereka (Lusardi, 2010).

Seorang mahasiswa pastinya sedikit banyak sudah mengetahui apa yang di maskut dengan pengelolaan keuangan, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang belum memhami pula bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan pribadi. Pengelolaan keuangan meimiliki beberapa fungsi yaitu untuk mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan, meminimalisasi terjadinya pembekakan pengeluaran dana yang tidak kita inginkan, mencapai target perencanaan dengan efisien, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahaan tiap-tiap otoritas. Beberapa hal tersebutlah yang mendasari mengapa kita harus memiliki dan memahami tentang pengelolaan keuangan pribadi.

2. Pengelola Keuangan Institusi pendidikan

2.2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Depdiknas Ditjen Dikdasmen, (2007) Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan

sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, prinsip keefektifan juga perlu mendapat penekanan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan dana pendidikan meliputi transparansi, akuntabilitas, keefektifan, dan efisiensi. Adapun penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut.

1) Transparansi

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) Transparansi diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011)transparansi adalah:“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah, transparansi keuangan sekolah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2) Akuntabilitas

Menurut Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Sementara Menurut Teguh Arifiyadi (2008) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya (1) transparansi para penyelenggara sekolah/madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, (2) standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dan (3) partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam mengadakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. (LPPKS, 2013).

3) Keefektifan

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan. Kemudian Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkatkepuasaan pengguna/client.

Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip keefektifan kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (LPPKS, 2013).

4) Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency”characterized by quantitative outputs”* (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*out put*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: (LPPKS, 2013).

- a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- b) Dilihat dari segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya.

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah/Madrasah

Setiap organisasi dalam menjalankan aktivitasnya tentu memerlukan sumber dana, begitu juga sekolah. Sumber-sumber pendapatan sekolah/madrasah bisa berasal dari pemerintah, dana masyarakat, dana swadaya, dan sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Berikut ini disajikan rincian masing-masing sumber pendapatan sekolah/madrasah : (LPPKS, 2013).

1) Pemerintah

Sumber dana pendidikan untuk SD, SMP dan SMA, saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disamping itu, terdapat dana khusus melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dana khusus dari APBD I dan APBD II. Dana BOS ini merupakan dana operasi nonpersonalia, sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin melalui APBN dan APBD.

2) Dana Masyarakat

Dana ini bisa berasal dari komite sekolah/orang tua siswa atau dari sponsor dan donatur.

3) Dana Swadaya

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang dapat menarik dana dari sponsor, (7) kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah, dan (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.

4) Sumber Lain

Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik yang bersifat *block grant* maupun yang bersifat *matching grant* (imbal swadaya).

2.2.3 Merencanakan dan Membelanjakan Anggaran Sekolah

Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa standar pembiayaan meliputi:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pembelanjaan Keuangan Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Pembukuan Keuangan Sekolah

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu salah satu tugas dari bendaharawan sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi

penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

2.2.4 Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pertanggungjawaban keuangan di sekolah/madrasah dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan instansi vertikal di atasnya serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Sebagai calon kepala sekolah, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah/madrasah.

Sebelum membahas pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah/madrasah, terlebih dulu dijelaskan tentang masalah-masalah yang seringkali muncul dalam pengelolaan keuangan. Di antara masalah-masalah tersebut adalah : (LPPKS, 2013).

1) Penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi)

Korupsi memang sudah menjamur di mana-mana, baik instansi swasta maupun negeri, termasuk juga di sekolah. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri dengan berbagai cara yang melanggar aturan hukum. Korupsi di sekolah sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi yang seringkali terjerat dalam kasus korupsi biasanya adalah kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah sebagai manajer memiliki keleluasaan dalam mengendalikan uang. Kebijakan-kebijakan yang di keluarkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah.

2) Pelaporan keuangan yang penuh manipulasi

Laporan keuangan mestinya dibuat secara transparan dan akuntabel, tetapi terkadang laporan keuangan sekolah dibuat dengan kecurangan yang sadar. Sebagian kalangan beranggapan, bahwa mencurangi untuk kebaikan adalah baik, alias halal. Maka mereka menganggap sah-sah saja membuat laporan palsu, yang penting uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, demi kebaikan bersama, dan untuk dimakan bersama. Jika demikian adanya, maka, apa gunanya peraturan dibuat? Bukankah peraturan dibuat untuk ditaati bukan untuk disiasati. Banyak alasan kenapa muncul laporan-laporan keuangan palsu, kuitansi palsu, saudara tangan palsu, stempel palsu.

3) Pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna

Dalam rencana anggaran terkadang masih bersifat umum. Misal, anggaran untuk membeli buku. Tidak disebutkan buku apa secara pasti. Tetapi manager sekolah harus arif dalam membelanjakan buku yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan kemudian belanja buku apa saja asalkan diskonnya besar dan kemudian diskon tersebut masuk kantong sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat dihindari apabila ada pengawasan yang berkesinambungan yang selalu dilaksanakan sehingga dapat diminimalisir.

Pengawasan Keuangan Sekolah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh

pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (LPPKS, 2013).

- 1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku,
- 2) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan,
- 3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif, dan
- 4) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar:

- 1) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan,
- 2) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan,
- 3) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaknya dapat dikurangi, dan
- 4) pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif dan tepat pada waktunya.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekolah

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

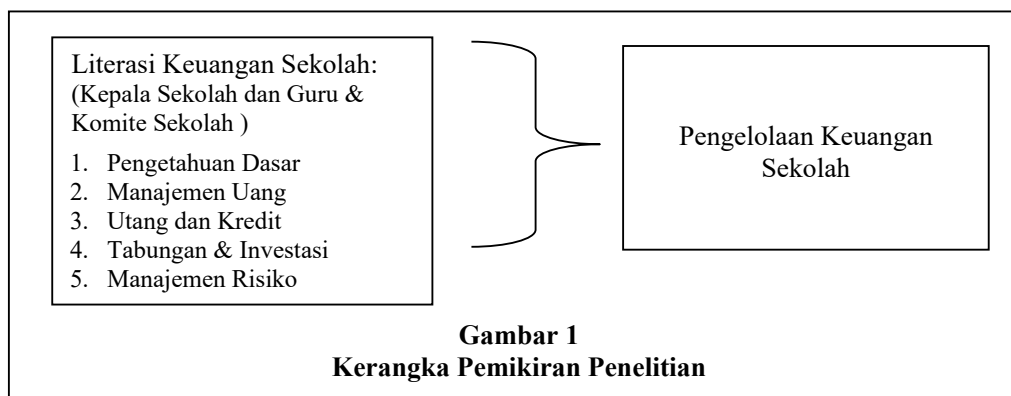
3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh komitmen dan perhatian pemerintah yang besar terhadap literasi keuangan, khusus untuk literasi keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global.

Penelitian tentang literasi keuangan dalam mengelola keuangan telah dilakukan oleh Sholpan Gaisina (2018) di Kazakhstan, oleh Rajendhiran dkk (2017) di India, Agnes Ndinda Mutiso & Robert Gitau Muigai (2018) di Kenya, P. Raja Babu (2015) juga di India, kemudian oleh Sholpan Gaisina (2018) di Kazakhstan. Dari beberapa peneliti tersebut menyatakan bahwa rata-rata literasi keuangan perangkat atau aparat terkait dengan pengelolaan keuangan masih rendah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia diantaranya oleh Muhammad Syaifullah (2015), Rola Pola Anto & Muhammad Amir (2017), Tuti Amalya dkk (2017), Yolanda dkk (2018), Kurniawan & Irman Firmansyah (2018). Hasil mepenelitian mereka menyatakan bahwa menunjukkan bahwa kompetensi dalam pengelolaan keuangan masih minim atau rendah.

Berdasarkan kajian teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya maka dapat dapat dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa literasi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah dapat digambarkan seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SMKN di Kota Pekanbaru dengan subjek penelitian pengelola keuangan di SMKN Kota Pekanbaru. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober tahun 2018.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan. Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai literasi keuangan pengelola institusi pendidikan (SMKN Kota Pekanbaru), penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada perolehan data asli.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa para pengelola keuangan SMKN di Kota Pekanbaru. Jumlah pengelola keuangan dalam setiap SMKN ditetapkan minimal 3 orang. Total Jumlah populasi dan sampel sejumlah 28 orang dari 9 SMKN di Kota Pekanbaru.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer diperoleh jawaban atas tes literasi keuangan responden, serta perilaku keuangan responden.

**Tabel 3.1
Daftar SMK Negeri di Kota Pekanbaru**

No.	NAMA SEKOLAH
1	SMK Negeri 1 Pekanbaru
2	SMK Negeri 2 Pekanbaru
3	SMK Negeri 3 Pekanbaru
4	SMK Negeri 5 Pekanbaru
5	SMK Negeri 4 Pekanbaru
6	SMK Negeri 6 Pekanbaru
7	SMK Negeri 7 Pekanbaru

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui questioner. Questioner nantinya akan disusun dalam dua bentuk, yaitu tes dan angket. Questioner bersifat tertutup. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keuangan pengelola keuangan di SMKN di Kota Pekanbaru maka responden akan diberikan tes dalam bentuk menjawab soal dengan jawaban pilihan berganda. Dan untuk mengetahui tingkat perilaku keuangan akan diberikan angket isian terkait dengan pola perilaku keuangan yang umum.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Tingkat Literasi Keuangan (Pengetahuan)

Aspek	Pertanyaan/ Pernyataan	Skala
Pengetahuan Dasar Keuangan	1. Manfaat Pengetahuan Keuangan	Ordinal
	2. Kuliah sebagai Investasi	
	3. Likuidasi Aset	
	4. Perhitungan Tingkat bunga	
	5. Pengaruh Inflasi	
	6. Inflasi daya beli	
Manajemen Uang	8. Faktor yg mempengaruhi Pendapatan	Ordinal
	9. Sumber Pendapatan	
	10. Instrumen keuangan	
	11. Pengeluaran tdk terduga	
	12. Manfaat Penganggaran	
Utang dan Kredit	14. Kelayakan Kredit	Ordinal
	15. Biaya Peminjaman	
	16. Faktor yg mempengaruhi Peminjaman uang	
	17. Kartu Kredit	
Tabungan dan Investasi	18. Lembaga penjamin simpanan	Ordinal
	19. Dana Max yg dijamin LPS	
	20. Deposito	
	21. Penerbit Deposito	
	22. Suku Bungan Deposito	
	23. Strategi Investasi	
Manajemen Risiko	25. Tujuan memiliki asuransi	Ordinal
	26. Waktu perlindungan asuransi	
	27. Kelompok Masyarakat Risiko paling besar	

Sumber: Chen dan Volpe (1998), Anastasia Sri M dan Suramaya Suci Kewal, (2012)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengkategorikan tingkat literasi keuangan mahasiswa. Hasil tes yang ditabulasikan dengan memberikan poin 1 untuk jawaban yang benar, dan memberikan nilai 0 untuk jawaban yang salah. Analisis selanjutnya dilakukan dengan statistik deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan tentang gambaran yang diteliti melalui data sampel tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), standar deviasi,

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan melalui analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan keuangan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru, analisis deskriptif dilakukan melalui ukuran gejala pusat maupun ukuran variabilitas. Ukuran gejala pusat seperti rata-rata, median dan modus, sedangkan ukuran variabilitas seperti rentang skor dan standar deviasi. Pada penelitian ini digunakan nilai rata-rata, dan standar deviasi untuk menggambarkan kondisi pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru.

4.1.1 Pengetahuan Pengelola Keuangan

Pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru diukur menggunakan 5 dimensi dan dioperasionalkan melalui 27 indikator. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif pada masing-masing indikator pengetahuan.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Pengetahuan Pengelola Keuangan

Indikator	Rata-Rata	Std. Dev.	Max.	Min.	Kriteria
P1	4,05	0,78	5,00	3,00	Baik
P2	3,71	0,68	5,00	3,00	Baik
P3	2,57	0,53	3,00	1,67	Kurang Baik
P4	3,05	0,59	4,00	2,00	Kurang Baik
P5	2,81	0,74	4,00	2,00	Kurang Baik
Dasar Keuangan	3,24	0,22	3,60	2,93	Kurang Baik
P6	2,14	0,50	3,00	1,67	Buruk
P7	3,71	0,78	5,00	2,67	Baik
P8	2,86	0,94	4,00	1,33	Kurang Baik
P9	2,19	0,26	2,67	2,00	Buruk
P10	2,38	0,56	3,33	2,00	Buruk
P11	2,19	0,42	3,00	1,67	Buruk
P12	3,19	0,77	4,00	2,00	Kurang Baik
P13	3,62	0,68	4,00	2,33	Baik
Manajemen Uang	2,79	0,29	3,13	2,42	Kurang Baik
P14	1,90	0,50	2,67	1,00	Buruk
P15	2,33	0,94	4,00	1,33	Buruk
P16	3,24	0,57	4,00	2,33	Kurang Baik
P17	2,86	0,60	4,00	2,00	Kurang Baik
Utang dan Kredit	2,58	0,34	3,00	2,00	Buruk
P18	3,38	0,80	4,33	2,00	Kurang Baik
P19	3,24	1,60	5,00	1,00	Kurang Baik
P20	1,57	0,53	2,33	1,00	Buruk
P21	1,19	0,50	2,33	1,00	Sangat Buruk

Indikator	Rata-Rata	Std. Dev.	Max.	Min.	Kriteria
P22	2,43	1,01	4,00	1,00	Buruk
P23	2,81	0,94	4,67	1,67	Kurang Baik
P24	2,10	0,16	2,33	2,00	Buruk
Tabungan & Investasi	2,39	0,27	2,86	2,05	Buruk
P25	1,95	0,13	2,00	1,67	Buruk
P26	2,52	0,84	3,00	1,00	Kurang Baik
P27	2,57	0,92	4,00	1,00	Kurang Baik
Manajemen Risiko	2,35	0,43	3,00	1,89	Buruk
Overall	2,69	0,18	2,89	2,37	Kurang Baik

Sumber: Data Olahan (2019)

Secara keseluruhan pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru, diperoleh rata-rata skor sebesar 2,69 dan lebih mendekati ke skor 3. Artinya mayoritas pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang pengelolaan keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya diantaranya oleh Muhammad Syaifullah (2015), Rola Pola Anto & Muhammad Amir (2017), Tuti Amalya dkk (2017), Yolanda dkk (2018), Kurniawan & Irman Firmansyah (2018). Hasil mepenelitian mereka menyatakan bahwa menunjukkan bahwa kompetensi dalam pengelolaan keuangan masih minim atau rendah.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengetahuan Dasar Keuangan

Pada dimensi pengetahuan dasar keuangan diperoleh rata-rata skor sebesar 3,24 dan lebih mendekati ke skor 4. Artinya pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru mengenai dasar keuangan pada umumnya masih kurang baik. Bila dilihat berdasarkan indikator, rata-rata skor tertinggi pada dimensi pengetahuan dasar keuangan sebesar 3,60 lebih mendekati ke skor 4 dan sudah termasuk baik, yaitu berkaitan dengan manfaat pengetahuan keuangan. Sebaliknya rata-rata skor terendah sebesar 2,93 lebih mendekati ke skor 3 dan masih termasuk kurang baik, yaitu berkaitan dengan likuiditas suatu aset.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan dasar keuangan pengelola keuangan sekolah, dapat dilihat bahwa dimensi tentang manfaat pengetahuan keuangan, hal dapat dipahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan maka setiap personal akan bersemangat untuk mempelajarinya baik secara formal maupun non formal dengan tujuan supaya setiap personal yang bersangkutan dapat Menuju keamanan finansial dengan pola belanja yang sehat, tidak mudah ditipu oleh orang lain. Berkaitan dengan ini menurut Benson (2014) mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan pribadi juga menuntut adanya pola hidup yang memiliki prioritas. Nalarnya adalah kekuatan dari prioritas (the power of priority) berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan seseorang ketika mengelola uangnya (Benson 2004). Dengan memiliki pengetahuan dasar keuangan kita dapat melakukan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. (Norma Yulianti dan Meliza Silvy, 2013).

Dalam dimensi lain tentang pengetahuan dasar keuangan, responden sebagian besar belum paham tentang likuiditas asset, hal ini bias dimaklumi bahwa latar belakang responden berasal dari berbagai bidang ilmu, umumnya yang paham tentang likuiditas dan asset adalah responden berlatar belakang ekonomi. Untuk itu pihak terkait harus terus mensosialisasikan tentang literasi keuangan ini untuk semua kalangan supaya mereka bias paham dan dapat mengelola keuangan dengan baik di tempat kerjanya masing-masing.

4.2.2 Manajemen uang

Pada dimensi personal finansial, diperoleh rata-rata skor sebesar 2,79 dan lebih mendekati ke skor 3. Artinya pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru mengenai personal finansial pada umumnya masih kurang baik. Bila dilihat berdasarkan indikator, rata-rata skor tertinggi pada dimensi personal finansial sebesar 3,13 lebih mendekati ke skor 4 dan sudah termasuk baik, yaitu berkaitan dengan bunga majemuk. Sebaliknya rata-rata skor terendah sebesar 2,42 lebih mendekati ke skor 2 dan masih termasuk buruk, yaitu berkaitan dengan pengaruh inflasi terhadap daya beli.

Pada dimensi ini rata-rata responden memperoleh skor tertinggi tentang personal finansial, personal finansial merupakan hal mendasar seseorang harus memahaminya seperti yang dikatakan oleh Amanita Novi Yushita (2017) Pentingnya literasi keuangan bagi individu bukan sekedar sebagai ilmu pengetahuan ataupun teori saja, tetapi diharapkan dapat membuat individu lebih bijaksana dan pandai dalam mengelola aset yang dimilikinya sehingga dapat memberikan timbal-balik yang bermanfaat dalam menyokong keuangan individu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga sama dengan yang dikatakan oleh (Ida dan Dwinta, 2010) bahwa Individu yang mengetahui dasar prinsip keuangan akan memiliki rencana pensiun yang lebih baik, memiliki kekayaan yang lebih besar, dan bisa menghindari hutang untuk kegiatan konsumtif dengan lebih baik.

Personal yang dapat dengan baik mengelola keuangannya dengan baik, akan dapat menikmati hidupnya dengan tenang tanpa harus memikirkan atau dikejar oleh penagih utang atau tukang kredit.

Pada dimensi bunga majemuk rata-rata responden sangat kurang memahaminya, hal dapat dimengerti bahwa sebahagian besar personal ingin yang praktis tanpa hitungan-hitungan yang rumit, perhitungan Bunga majemuk biasanya dipelajari untuk jurusan-jurusan tertentu, jadi tidak semua responden dapat memahaminya.

4.2.3 Utang dan Kredit

Pada dimensi utang dan kredit diperoleh rata-rata skor sebesar 2,58 dan lebih mendekati ke skor 3. Artinya pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru mengenai uang dan kredit pada umumnya masih kurang baik. Bila dilihat berdasarkan indikator, rata-rata skor tertinggi pada dimensi Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meminjam uang sebesar 3,00 dan masih termasuk kurang baik, yaitu berkaitan dengan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meminjam uang. Sebaliknya rata-rata skor terendah sebesar 2,00 termasuk buruk, yaitu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit.

Hasil penelitian dalam dimensi ini terutama tentang Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meminjam uang sebahagian responden sangat memahaminya, hal ini karena pengetahuan keuangan terkait dengan faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, merupakan aspek penting dimana seseorang mampu mengelola pengeluaran pengeluarannya dalam hal pemanfaatan kredit. Seseorang yang bijak tidak akan

melakukan pembelian kredit seandainya penghasilannya tidak mencukupi dalam membayar angsuran setiap masa angsuran, untuk itu harus bijak untuk memilah keperluan yang hanya dibutuhkan saja bukan yang diminati.

Untuk dimensi faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, sebahagian besar responden kurang memahaminya. Hal ini disebabkan bahwa faktor-faktor tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja, misalnya oleh analisis kredit. Pemahaman tentang hal ini terkait dengan jangka waktu pelunasan, tingkat suku bunga, dan jenis agunan (*collateral*)

4.2.4 Tabungan dan Investasi

Pada dimensi tabungan dan investasi diperoleh rata-rata skor sebesar 2,39 dan lebih mendekati ke skor 2. Artinya pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru mengenai tabungan dan investasi pada umumnya masih buruk. Bila dilihat berdasarkan indikator, rata-rata skor tertinggi pada Lembaga yang menjamin simpanan di bank dan investasi sebesar 2,86 lebih mendekati ke skor 3 dan masih termasuk kurang baik, yaitu berkaitan dengan Penerbit Sertifikat Deposito. Sebaliknya rata-rata skor terendah sebesar 2,05 termasuk sangat buruk, yaitu berkaitan dengan penerbit sertifikat deposito.

Hasil penelitian dalam dimensi ini terutama untuk Lembaga yang menjamin simpanan di bank dan investasi dikarenakan sebahagian responden sudah tahu bahwa industry perbankan disertai dengan suatu lembaga yang bertugas untuk menjamin simpanan masyarakat di bank tersebut, berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Sebaliknya untuk dimensi sertifikat deposito responden kurang memahaminya, hal ini disebabkan bahwa sebahagian responden merupakan nasabah bank dalam bentuk tabungang, sebahagian responden menerima gaji melalui transfer ke tanungan mereka. Menabung dan mendepositokan uang berbeda persyaratannya, lebih mudah menabung, bisa dilakukan dimana saja, melalui transfer atau setor tunai.

4.2.5 Manajemen Risiko

Pada dimensi manajemen risiko, diperoleh rata-rata skor sebesar 2,35 dan lebih mendekati ke skor 2. Artinya pengetahuan pengelola keuangan satuan pendidikan SMKN di kota Pekanbaru mengenai manajemen risiko pada umumnya masih buruk. Bila dilihat berdasarkan indikator, rata-rata skor tertinggi pada dimensi manajemen risiko sebesar 3,00 lebih mendekati ke skor 3 dan masih termasuk kurang baik, yaitu berkaitan dengan kelompok masyarakat yang memiliki resiko paling besar. Sebaliknya rata-rata skor terendah sebesar 1,89 lebih mendekati ke skor 2 dan masih termasuk buruk, yaitu berkaitan dengan tujuan utama memiliki asuransi.

Pengetahuan keuangan terkait dengan manajemen risiko diartikan sebagai kepemilikan pemahaman tentang perlindungan sumber daya, yaitu melalui produk asuransi atau teknik manajemen risiko lainnya. Hasil penelitian tentang dimensi manajemen risiko terkait dengan tujuan utama memiliki asuransi masih rendah, hal ini disebabkan bahwa responden belum mengerti tentang tujuan dari asuransi diantaranya melindungi diri dari kerugian berkelanjutan akibat berbagai macam risiko yang mungkin terjadi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan pengelolaan keuangan satuan pendidikan SMKN di Kota Pekanbaru masih dalam kategori rendah, dari lima dimensi yang diteliti hanya pengetahuan dasar keuangan yang dalam kategori sedang, empat lainnya masih rendah. Rendahnya tingkat literasi keuangan pengelola keuangan di SMKN di Kota Pekanbaru bisa disebabkan karena memang mereka belum memahami secara mendalam tentang literasi keuangan walaupun mereka sebagai pengelola keuangan, latar belakang pendidikan responden tidak semua responden berlatar belakang ekonomi atau akuntansi bahkan sebahagian besar berasal dari exacta, dan responden sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan literasi keuangan.

5.2 Saran

Hasil penelitian menemukan bahwa literasi keuangan pengelola pendidikan di Instansi pendidikan SMK Negeri di Kota Pekanbaru masih rendah, maka disarankan supaya personel dan pengelola benar benar berupaya memahami bagaiman cara mengelola keuangan di instansi masing masing dan mau belajar lagi tentang konsep konsep keuangan mendasar sebagai bekal dalam mengelola keuangan di sekolah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A Garner, Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, Thomson West.
- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).
- Ade, Gunawan, 2003, Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan, Jurnal Ilmiah "Manajemen & Bisnis" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Muhaammadiyah Sumatera Utara.
- Ali Muhidin, et al. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amaliyah, Riski dan Rini Setyo Witiastuti. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan UMKM Kota Tegal. *Management Analysis Journal*, Volume 4 No. 3. Hal 252-257.
- Amanita Novi Yushita. 2017. Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 1 / tahun 2017*.
- Amanita Novi Yushita, 2017. Pentingnya literasi keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 1 / Tahun 2017*.
- Anastasia Sri Mendari, Fransiska Soejono. 2018. Literasi Keuangan Dosen-Dosen Perguruan Tinggi Di Palembang: Faktor Gender dan Usia. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 3, Nomor 1, Juni 2018: 74-88. ISSN: 1410-4571, E-ISSN: 2541-260.
- Andrew, V., & Linawati, N. 2014. Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan Dengan Perilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya. *Finesta*, 2(2), 35-39.
- Anis, Dwiastanti. 2015. Financial literacy as the Foundation for Individual Financial behavior. *Journal of Education and Practice*. Vol.6, No.13. pp.99-105.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di*
- Carly Sawatzki & Peter Sullivan. 2017. Teachers' Perceptions of Financial Literacy and the Implications for Professional Learning. *Australian Journal of Teacher Education*. Volume 42 | Issue 5 Article 4.
- Chen, H. & Volpe, R. 1998. An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students, *Financial Services Review*, Vol. 7 No.2, pp. 107-128.
- Chen, H. & Volpe, R. 1998. An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students, *Financial Services Review*, Vol. 7 No.2, pp. 107-128.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S., 2014. *Business Research Methods*. (12th ed.). Mc Graw Hill Companies, Inc. New York
- Cummins M., Haskel J. H., & Jenkins S. 2009. Financial Attitudes and Spending Habits of University Freshmen. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 10, (1), 3-6.
- Garman, E. Thomas dan Fogue, Raymond E. 2010. *Personal Finance 11th Edition*. United States of America: Cengage Learning Inc.
- Garman, E. Thomas dan Fogue, Raymond E. 2010. *Personal Finance 11th Edition*. United States of America: Cengage Learning Inc.

- Gitman, Lawrence J, 2006. Principles of Managerial Finance. USA, Pearson.
- Hayat, Wahid Al. 2014. “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Huston, S.J. 2010. Measuring financial literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296-312. September 10, 2009.
- Ida dan Dwinta, Chintia Yohana. 2010. Pengaruh Locus Of Control, Financial Knowledge, dan Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Universitas Kristen Maranatha. Vol.12, No.3, Hlm.131-144.
- Kapoor, J.R., L.R. Dlabay, dan R.J. Hughes. 2004. *Personal Finance*, Seventh Edition, Mc.GrawHill Book, Co., New York.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. 2013. *Pengelolaan keuangan sekolah/ madrasah*. LPPKS, Indonesia
- Krishna, A., Sari, M. & Rofaida, R. 2010. Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya-Survey pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses melalui [http://www.file.upi.edu/Direktori L-FPEB Prodi manajemen](http://www.file.upi.edu/Direktori_L-FPEB_Prodi_manajemen).
- Lukito & Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Lusardi, A., et al. 2010. Financial Literacy Among The Young. *Journal of Consumer Affairs* Volume 44 Issue 2.
- Mehr & Cammack – A.. Hasyimi, 1990. “Dasar-Dasar Asuransi”, Balai Aksara, Jakarta.
- Nababan, D., dan Sadalia, I. 2012. Analisis Personal Financial Literacy and Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi.
- OJK et al. 2013. *Final Report Developing Indonesian Financial Literacy Index*. Yogyakarta: DEFINIT.
- Rajna, A., Ezat, Sharifah W.P., Junid, Syed Al, dan Moshiri, H. (2011). Financial Management Attitude and Practice among the Medical Practitioners in Public and Private Medical Service in Malaysia. *International Journal of Business and Management* Vol. 6, No. 8, Hlm. 105-113.
- Remund dalam Widyawati. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi financial mahasiswa. Tesis. fakultas ekonomi dan bisnis universitas Brawijaya.
- Remund, D. L. 2010. Financial literacy explicated: The case for a clear definition in an increasingly complex economy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 276-295.
- Remund, David L. 2010. Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44 (2), 276-295. Diunduh pada tanggal 19/10/13:26 WIB.
- Ricciardi, V. & Simon, H. K. 2000. What is Behavioral Finance?. *Business, Education and Technology Journal* Fall 2000.

- Robb, C. A. and James, R. N. 2009. Associations between individual characteristics and financial knowledge among college students. *Journal of Personal Finance*, 8, 170-184.
- Sejathi. 2011. Faktor Penentu Efektivitas Pembelajaran. [http:// www. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran](http://www.faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas-pembelajaran). (Online).
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Surendar & Subramanya Sarma. 2018. Financial Literacy And Financial Planning Among Teachers Of Higher Education- A study Of Critical Factors Of Select Variables. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*. Volume 118 No. 18 2018, 1627-1649.
- UNESCO. 2005. *Development of information literacy: through school libraries in South-East Asia Countries*. (Bangkok: UNESCO, 2005).
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Wagland, S.P. and Taylor, S. 2009. When It comes to financial literacy, is gender really an issue?. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*. Volume 3 Issue 1.
- Widayati. I. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Financial Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol I (1), 89-99.